

TESIS

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ATASAN YANG
BERHAK MENGHUKUM DALAM STRUKTUR
KEPOLISIAN DARI ASAS HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**



Disusun Oleh:

Kartiko Sulistiyono

2320215310050

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ATASAN YANG
BERHAK MENGHUKUM DALAM STRUKTUR
KEPOLISIAN DARI ASAS HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**

Tesis

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun Oleh:

Kartiko Sulistiyono
NIM. 2320215310050

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**Judul Tesis : Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak
Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas
Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Nama : Kartiko Sulistiyono

NIM : 2320215310050

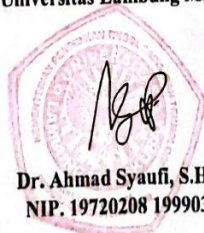
**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



**Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 1978050 2200112 2 002**

Diketahui

**Koordinator Program Magister
Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 1978050 2200112 2 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 9 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

“Kejahatan akan berkuasa apabila orang baik tidak melakukan apa-apa”

Kartiko Sulistiyono

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

**SAYA PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) INI UNTUK
ALMARHUM KEDUA ORANG TUA SAYA. TERIMA KASIH ATAS
SEGALA PENGORBANAN YANG TELAH KALIAN BERIKAN.**

**KARYA INI JUGA SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ISTRI TERCINTA
DAN KEDUA ANAK YANG TELAH MEMBERIKAN MOTIFASI
HINGGA SAAT INI.**

**SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK/IBU DOSEN
YANG TELAH MEMBIMBING DAN MEMBERIKAN ARAHAN SELAMA
PROSES PENULISAN TESIS INI. TANPA BIMBINGAN ANDA SAYA
TIDAK AKAN BISA MENYELESAIKANNYA.**

**KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK TEMAN TEMAN YANG
SELALU ADA MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DUKUNGAN. TERIMA
KASIH TELAH MENJADI BAGIAN DARI PERJALANAN INI.**

**SAYA JUGA MEMPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK DIRI SAYA
SENDIRI, SEBAGAI PENGINGAT BAHWA SETIAP USAHA DAN KERJA
KERAS PASTI AKAN MEMBUAHKAN HASIL.**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartiko Sulistiyono

NIM : 2320215310050

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak
Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas Hukum
Dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



METERAL
TEMPEL
11AMX410424161

Kartiko Sulistiyono

SULISTIYONO, KARTIKO, 2025. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM STRUKTUR KEPOLISIAN DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

RINGKASAN

Penelitian ini membahas kewenangan *Ankum* (Atasan yang Berhak Menghukum) dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia dari perspektif hukum normatif dan hak asasi manusia (HAM). Fokus utama kajian adalah bagaimana dasar hukum, struktur kewenang, hukuman disiplin oleh *Ankum* dilaksanakan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 2 Tahun 2003), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, *Ankum* memegang peran penting dalam menjaga kedisiplinan internal anggota Polri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelanggaran terhadap HAM, baik akibat penjatuhan hukuman yang tidak proporsional, kurangnya pengawasan, maupun tidak diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap pemahaman HAM bagi pejabat *Ankum*, evaluasi mekanisme penjatuhan hukuman, dan harmonisasi antara aturan internal kepolisian dengan standar HAM nasional dan internasional.

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pengawasan internal, penyusunan pedoman penegakan disiplin yang berbasis HAM, serta peningkatan pelatihan dan pemahaman hukum bagi pejabat yang diberi kewenangan menghukum.

SULISTIYONO, KARTIKO, 2025. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM STRUKTUR KEPOLISIAN DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci: Anlum, Kepolisian, Penegakan Disiplin, Asas Hukum, Hak Asasi Manusia.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dalam institusi kepolisian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penghukuman oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Anlum) sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan akuntabilitas kewenangan tersebut. Hal ini menjadi relevan mengingat institusi kepolisian memiliki struktur hirarki yang ketat serta peran strategis dalam penegakan hukum dan ketertiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang, peraturan internal kepolisian, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Anlum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi pelanggaran HAM karena minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM oleh sebagian pelaksana disiplin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan aspek legal formal dan edukasi HAM bagi para pejabat kepolisian, agar proses penjatuhan sanksi disiplin dapat berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar personel kepolisian.

SULISTIYONO, KARTIKO. 2025. AUTHORITY AND JURISDICTION OF SUPERIORS IN THE POLICE HIERARCHY UNDER THE RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS PRINCIPLES., Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: Ankum, Police, Disciplinary Enforcement, Legal Principles, Human Rights.

The background of this research stems from the importance of maintaining a balance between disciplinary enforcement within the police institution and respect for human rights (HR). In practice, the exercise of disciplinary authority by the Superior Authorized to Punish (Ankum) often raises questions regarding the limits and accountability of such authority. This is particularly relevant given the hierarchical structure of the police and their strategic role in law enforcement and public order. This research is normative legal research conducted using statutory, conceptual, and case approaches. Data sources are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, including laws, internal police regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the authority of Ankum is based on regulations such as Government Regulation No. 2 of 2003 concerning the Disciplinary Code of the Indonesian National Police. However, in practice, there is a potential for human rights violations due to weak supervisory mechanisms and a lack of understanding of human rights principles among disciplinary officers. Therefore, it is necessary to strengthen legal and institutional frameworks and improve human rights education for police officials, ensuring that disciplinary actions are carried out fairly, transparently, and with full respect for the basic rights of police personnel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan terima kasih kehadiran Allah SWT,atas segala berkah,rahmat, dan karuniaNya yang telah memberikan ilmu pengetahuan,pengalaman,kekuatan,kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini hingga akhir.Tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak ,maka penyusunan tesis tidak berjalan dengan baik.Hingga selesainya penulisan tesis ini telah banyak menerima bantuanwaktu, tenaga, dan pikiran dari banyak pihak.Sehubungan dengan ini, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H. selaku ketua/koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat untuk penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Dr. HJ. ERLINA, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, kemudahan dalam melengkapi berkas berkas dari penelitian proposal tesis, penyusunan seminar proposal, hingga penyusuanna berka tesis.
3. Bapak Dr. H. ICHSAN ANWARY, S.H, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat untuk penyelesaian tesis ini, dan memberikan pemecahan masalah yang tepat.
4. Dosen dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan waktu,

masuk dan dukungan membantu dalam segala hal baik dalam kegiatan perkuliahan dan juga berbentuk administrasi selama pengerjaan tesis ini.

5. Untuk kedua orang tua saya, Almarhum KADARISMAN dan Almarhumah SITI ASYUROH yang telah melahirkan dan merawat hingga kini bisa menyelesaikan tesis ini, semoga beliau berdua diterima disisiNya, segala amal dan perbuatan akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.
6. Untuk keluarga saya terutama abang pertama saya Joko, kakak kedua saya Lely, kakak ketiga Risma serta kakak ipar, yang selalu memberikan semangat dan arahan setiap langkah hidup saya.
7. Juga untuk kakak ipar yang di Kalimantan yang selalu memberikan arahan petunjuk dan motivasi penuh baik dalam kehidupan maupun pada saat menempuh perkuliahan strata dua di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya setelah ayah dan ibu, yaitu istri tercinta yang selama ini sudah memberikan kekuatan, pengorbanan baik moral maupun materiil, senantiasa memperingatkan untuk rajin kuliah, kadang mengingatkan kalau mau ujian belajar dulu.
9. Terima kasih untuk teman sejawat Polsek Astambul, khususnya bekas anak buah sat Reskrim Polsek Astambul maupun PHL nya, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus mencari ilmu, dan juga kadang karena gaptek minta tolong cara mengirimkan lembar jawaban di link Universitas Unlam.

10. Terima kasih teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khusus nya konsentrasi Hukum Tata Negara, buat Akhmad Saripudin, M.Ridha, Okta, Bachrudin, Trenady, Ketua Aman Pak Rubi, Sri fatanah, Maisyarah, Nourismi, Pak Rahmat, Subhi, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya, suka duka saling memberikan masukan dan arahan perihal ketata negaraan, semoga persahabatan kita selama di Magister Hukum tetap terpelihara dan jangan sampai putus untuk saling silaturahmi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan segala kebaikan didunia dan diakhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, dan semoga Institusi yang peneliti cintai dan banggakan ini ada perubahan yang signifikan baik budaya maupun kulturennya, khususnya perihal anjum dalam menjatuhkan hukuman proporsional, adil dan tidak bertentangan dengan asas hukum dan HAM.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penelitian tesis ini dimana kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan perhatian selama proese penyelesaian tesis ini.

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Kartiko Sulistiyono

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Keaslian Peneliti.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka	20
F. Metode Penelitian.....	32
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM STRUKTUR KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS HUKUM.....	44
A. Pengertian Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)	44
B. Struktur Kepolisian dan Hirarki Kewenangan	49
C. Dasar Hukum Kewenangan Penghukuman	58
D. Asas Hukum yang Mendasari Tindakan Penghukuman.....	68
E. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Ankum.....	74
BAB III PENERAPAN KEWENANGAN PENGHUKUMAN OLEH ATASAN DALAM KEPOLISIAN SEJALAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA	81
A. Prinsip-Prinsip HAM dalam Proses Penegakan Disiplin	81
B. Standar Internasional Terkait HAM dalam Penegakan Disiplin Aparat	87
C. Perbandingan antara Praktik Penghukuman dengan Prinsip HAM.....	91
D. Hambatan dalam Menjaga Keselarasan antara Penegakan Disiplin dan HAM	95

E. Rekomendasi Penguatan Asas HAM dalam Penerapan Hukuman di Kepolisian.....	99
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahapan Dalam Penelitian Hukum Normatif